

BAB III
DESKRIPSI TPLA DAN PELAKSANAAN PLA

3.1 Sejarah singkat TPLA

Pemerintah Kota Tasikmalaya terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 17.156,20 Ha atau 171,56 KM², yang meliputi 8 (delapan) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang dan Cibeureum dengan jumlah Kelurahan 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kecamatan dan jumlah wilayah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Cihideung	5,30	6
2.	Cipedes	8,10	4
3.	Tawang	5,33	5
4.	Indihiang	30,10	13
5.	Kawalu	41,12	10.
6.	Cibeureum	29,41	15
7.	Tamansari	28,52	8
8.	Mangkubumi	23,68	8
	Jumlah	171,56	69

Tabel 3.2

Luas wilayah Kecamatan dan Jumlah wilayah Kelurahan setelah pemekaran.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Cihideung	5,30	6
2.	Cipedes	8,10	4
3.	Tawang	5,33	5
4.	Indihiang	11,88	6
5.	Bungursari	18,22	7
6.	Kawalu	41,12	10
7.	Cibeureum	17,54	9
8.	Purbaratu	11,87	6
9.	Tamansari	28,12	8
10.	Mangkubumi	23,68	8
	Jumlah	171,56	69

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika pemerintahan maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka pada tanggal 19 Mei 2008 disahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum (tabel 2) dengan jumlah penduduk sampai dengan bulan September berdasarkan data Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya berjumlah

588.229 jiwa terdiri dari 299.174 jiwa laki-laki dan 289.055 jiwa perempuan dan jumlah kepala Keluarga 148.199 KK .

Tabel 4.2
Sebaran penduduk dan Kepala Keluarga per Kecamatan di Kota
Tasikmalaya Tahun...

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Cihideung	69.970	16.714
2.	Cipedes	67.771	17.434
3.	Tawang	64.489	17.863
4.	Indihiang	40.385	9.979
5.	Kawalu	80.469	21.980
6.	Cibeureum	55.428	13.190
7.	Mangkubumi	75.339	18.028
8.	Tamansari	56.991	14.442
9.	Bungursari	40.276	9.984
10.	Purbaratu	36.113	8.585
	Jumlah	575.078	149.199

Visi Kota Tasikmalaya

Dengan berlandaskan iman dan taqwa Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur tahun 2012.

Misi Kota Tasikmalaya

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa
- b. Meningkatkan kesadaran hukum dan meneguhkan supremasi hukum.
- c. Menumbuhkan kekuatan hukum Kota Tasikmalaya
- d. Menciptakan Pemerintahan yang professional dan bersih
- e. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.
- f. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
- g. Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana Kota.

Kondisi dan Karakteristik Wilayah

Letak geografis

Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis yaitu berada pada $108^{\circ}08'12''$ BT dan $7^{\circ}10'26''$ LS di bagian tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 5.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan menurut sektor usaha &
PDRB Kota Tasikmalaya atas dasar harga konstan)

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	283,689.30	285,657.03	283,411.97	
2.	Pertambangan dan penggalian	181.31	186.91	190.41	
3.	Industri Pengolahan	492,350.11	525,271.36	554,357.32	
4.	Listrik, gas dan air bersih	39,460.41	44,489.41	49,582.08	
5.	Bangunan	258,871.08	262,124.54	292,479.80	
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	817,750.98	824,451.19	883,383.09	
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	278,235.25	283,281.82	293,972.06	
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	281,244.08	331,157.02	326,652.94	
9.	Jasa-jasa	381,582.09	390,509.14	413,938.71	
	PDRB	1,833,366.58	2,947,228.42	3,097,968.38	

1. Profil Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya

Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya terbentuk pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2003. Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya saat ini berlokasi di Kompleks Bumi Resik Indah Jalan Boulevard Nomor 1 Tasikmalaya, dengan menempati lahan seluas 1.425 M² dan luas bangunan 600 M² yang telah bersertipikat Hak Pakai atas nama BPN-RI. Jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya adalah 47 orang ditambah oleh tenaga Sukwan yang direkrut dari masyarakat sekitar Tasikmalaya yang ditempatkan pada masing-masing Seksi sesuai kemampuannya. Sekalipun Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya baru berdiri tahun 2004 namun dibidang pelayanan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan tetap mendukung Program Pembangunan Pertanahan atau Reforma Agraria yang sedang dilaksanakan dan dikembangkan oleh BPN-RI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya untuk mendukung program Reforma Agraria adalah melalui peningkatan percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dengan diluncurkannya Program SAS dan Larasita. Adapun pengadaan kendaraan dan perangkatnya berasal dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hasil kerjasama Pemda dan DPRD Kota Tasikmalaya yang pada saat ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

SAS (*Stand Alone System*) adalah suatu program komputerisasi aplikasi mandiri yang mempunyai fungsionalitas untuk mengelola data (input dan pemeliharaan data dimana produk akhir aplikasi ini antara lain Gambar Ukur (SU) Peta Pendaftaran, Buku Tanah/Sertipikat, Surat Ukur (SU), dalam format cetakan (hardcopy dan softcopy).

2. Produk Sertifikasi

Kota Tasikmalaya dengan luas 17.156,20 Ha terdiri dari 278.645 Bidang, jumlah bidang yang telah bersertipikat sebanyak 87.241 Bidang. Terdiri dari :

- Hak Milik 72403 Bidang
- Hak Guna Bangunan 12810 Bidang
- Hak Pakai 897 Bidang
- Sertipikat wakaf 1131 Bidang

3. Hambatan

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memenuhi target yang telah dicanangkan selalu muncul hambatan-hambatan dalam pencapaian tersebut, hambatan itupun dirasakan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Hambatan yang amat terasa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, ketiadaan peta dasar/peta kerja/peta pendaftaran juga belum tercukupinya titik dasar teknis baik untuk orde 3 maupun orde 4. Pegawai pada kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya dari 47 orang pegawai 21 diantaranya adalah pejabat structural, 26 pegawai yang ada berusia rata-rata diatas 40 tahun. rincian pegawai masing-masing Seksi sebagai berikut :

Tabel 6.2

Uraian	Struktural	Staf
Kakan	1	-
TU	3	4
SP & P	3	8
HT & PT	5	14
PPP	3	-
PPPM	3	-
SKP	3	-
Jumlah	21	26

Ketiadaan peta dasar sebagai acuan untuk melaksanakan suatu kegiatan terutama pelaksanaan pengukuran menjadi kendala tersendiri apalagi bila dikaitkan dengan kurangnya titik dasar teknis orde 3, idealnya untuk wilayah seluas kota Tasikmalaya harus tersedia 7 titik. Saat ini terdapat 4 titik yang baru terpasang pada tahun 2008.

4. Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, menunjang program reforma agraria BPN RI dan juga sebagai pelayanan masyarakat diperlukan suatu perencanaan yang matang, pengawasan yang berkesinambungan, SDM yang memadai dan juga prasarana yang lengkap.

3.2 Deskripsi kerja setiap bidang

Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal badan pertanahan nasional di kabupaten atau kota yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada kepala badan pertanahan nasional melalui kepala Kanwil BPN. Kantor pertanahan di pimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kantor pertanahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan.
2. Pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan.
3. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survey potensi tanah.
4. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform , konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil , perbatasan, dan wilayah tertentu.
5. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah , pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah.
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.
8. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah.
9. Pengelolaan system informasi manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS).

10. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta.
11. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan.
12. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang – undangan serta pelayanan pertanahan.

Susunan dan struktur organisasi kantor pertanahan terdiri dari:

- 1) Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan data dan informasi.
 - b. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
 - c. Pelaksanaan kepengurusan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
 - f. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
 - g. Koordinasi pelayanan pertanahan.
- 2) Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah.
 - b) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga, dan tukar menukar, — saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perizinan, saran pertimbangan usulan, penetapan hak dan pengelolaan hak tanah.

- c) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan pendaftaran hak.
 - d) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik Negara, daerah bekerja sama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah.
 - e) Pendataan dan penertiban tanah bekas, tanah hak
 - f) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
 - g) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
 - h) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas hak dan pembinaan PPAT.
- 3) Seksi pengaturan dan penataan pertanahan mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan / zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan izin, perubahan penggunaan tanah, penataan bersama untuk peremajaan kota daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.
 - b) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca pentagunaan tanah kabupaten / kota dan kawasan lainnya.
 - c) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten / kota dan kawasan.

- d) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan / zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah objek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform.
- e) Pengusulan penetapan atau penugasan tanah menjadi objek landreform.
- f) Pengambil alihan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform.
- g) Penguasaan tanah objek landreform.
- h) Pemberian izin peralihan hak atas tanah pertanian dan izin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
- i) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek dari landreform.
- j) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform dan penegasan objek konsolidasi tanah.
- k) Penyediaan tanah untuk pembangunan.
- l) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.

4) Seksi pengendalian dan pemberdayaan mempunyai fungsi:

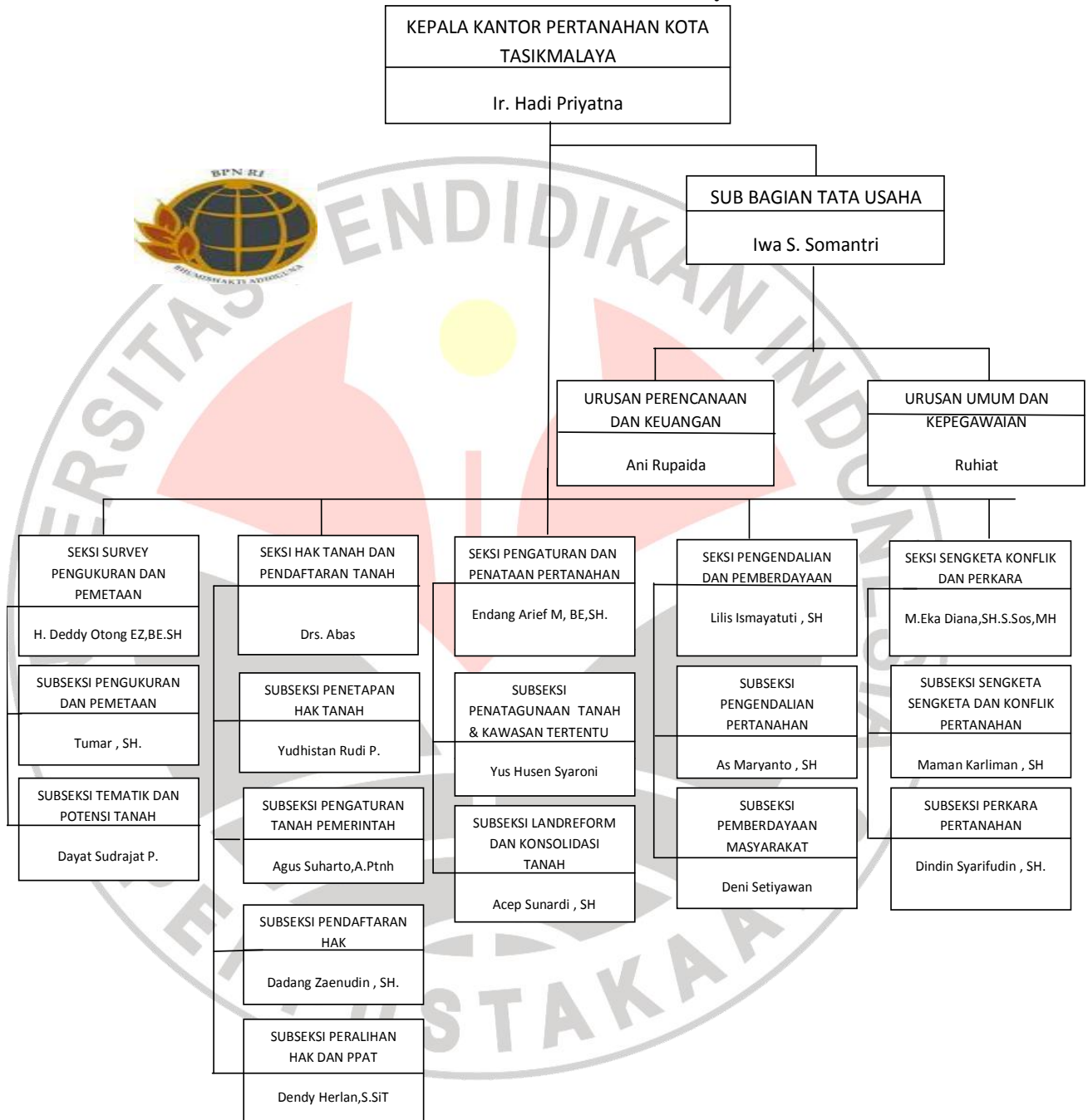
1. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan / zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan izin, perubahan penggunaan tanah, penataan bersama untuk peremajaan kota daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.
2. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penggunaan tanah kabupaten / kota dan kawasan lainnya.
3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten / kota dan kawasan.
4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan / zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah objek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform.
5. Pengusulan penetapan atau penugasan tanah menjadi objek landreform.
6. Pengambil alihan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform.
7. Penguasaan tanah objek landreform.
8. Pemberian izin peralihan hak atas tanah pertanian dan izin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
9. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek dari landreform.

5) Seksi sengketa, konflik dan perkara mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertahanan.
2. Pengkajian masalah sengketa dan konflik dan pertahanan.
3. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertahanan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa dan konflik pertahanan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah.
4. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertahanan.
5. Pelaporan penanganan dan penyelesain konflik, sengketa dan perkara pertahanan.

Struktur Organisasi

Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya



3.3 Deskripsi kegiatan PLA

Kegiatan PLA merupakan suatu langkah untuk memahami atau mematangkan pembelajaran yang telah di kaji dalam teori dengan demikian adanya PLA sangatlah membantu penulis memahaminya dalam dunia kerja atau lapangan. Sesuai kajian yang ada di Badan pertanahan nasional (BPN) kota tasikmalaya penulis memahami system kerja BPN kota tasikmalaya. Baik kerja outdoor maupun indoor BPN itu sendiri. Untuk kegiatan PLA yang penulis lakukan lebih memprioritaskan pengukuran kadastral dan pengolahan data hasil ukur. Untuk pertama kalinya penulis mengikuti prosedur yang telah BPN terapkan sesuai dengan pengkajian penulis yaitu kegiatan pengukuran kadastral. Maka dari itu, penulis urakan kegiatan tersebut :

1. Di BPN kota Tasikmalaya itu sendiri, pengukuran kadastral yang hanya mencari luasan suatu wilayah. dikarenakan BPN adalah sebuah instansi yang mempunyai tugas atau peranan penting mencantumkan suatu luas tanah yang terdapat dalam sertifikat yang resmi. Di dalam pengukuran itu sendiri, mekanisme pengukuran yang dipakai di BPN kota Tasikmalaya ialah :
 - a) Mengetahui terlebih dahulu batas-batas tanah yang akan diukur.
 - b) Beri patok setiap sudut batas tanah yang akan di ukur
 - c) Tentukan basis dan arah azimuth terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran lebih jauh. alasan menentukan basis dan azimuth ialah menentukan suatu posisi rumah dengan tingkat kemiringan dan jarak basis tersebut.
 - d) Ukur dengan meteran ke setiap sudut batas tanah namun ada juga lahan atau tanah yang melebihi atau kurang dari batas tanah maka dari itu. untuk setiap tanah yang melebihi atau kurang dari batas tanah disebut *seslah* (*bahasa belanda*).

- e) Setelah mengukur batas lahan kalau memungkinkan ada bangunan (gedung, rumah) ukur seluruh ke setiap sudut rumah sehingga akan di dapat jarak-jarak bangunan.
 - f) Tahapan akhir dalam pengukuran adalah mencari titik control atau diagonal.Fungsi diagonal atau titik control ialah sebagai referensi penggambaran atau titik temu dalam penggambaran yang tersedia dalam auto cad 2004 atau 2009.
- 2 Di dalam segi grafikal atau penggambaran, BPN kota Tasikmalaya sangat dominan menggunakan AutoCad 2004 untuk penggambaran atau hasil dari pengukuran namun ada suatu software yang khusus untuk menghitung polygon.Sayangnya,software itu kurang sekali digunakan dikarenakan dalam hitungan polygon diharuskan lahan atau tanah yang lebih dari 2000m²,maka itu,BPN kota Tasikmalaya lebih sering mengukur dengan lingkup tanah ukuran luas kurang dari 1000m².

3.4 Jadwal kerja kegiatan PLA

Jadwal Kegiatan PLA di BPN KOTA TASIKMALAYA

8 Februari 2011 – 2 Mei 2011

Tanggal/Bulan	Jenis Kegiatan
16 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Mengenai BPN
17 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar Mengolah Data Ukur Menggunakan Autocad 2004
22 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran di lapangan
28 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data hasil ukur
15 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pengukuran Program PRONA & UKM
25 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Data Hasil PRONA, UKM, dan lain-lain.
2 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Perpisahan PLA di BPN Kota Tasikmalaya

3.5 hambatan dan keberhasilan atau masalah dan penyelesaiannya

3.5.1 Hambatan

1. aspek organisasi

pada aspek organisasi ini hambatan yang penulis alami yaitu kurangnya koordinasi antar subseksi. Dan juga antara staff dengan manajemen kurang menjalin hubungan yang harmonis sehingga mengakibatkan kurang lancarnya oprasional kerja.

2. Aspek oprasional

Dalam aspek ini penulis menemui hambatan, yaitu kurang lengkapnya peralatan baik itu di grafikal ataupun di pengukuran . Di grafikal komputer - komputer yang digunakan dalam proses pembuatan masih kurang lengkap baik software ataupun hardware , alat ukur pun masih sangat terbatas sehingga pengukuran pun akan sangat terasa memakan waktu.

3. Aspek personalia

- Kurangnya sumber daya manusia di tiap – tiap seksi dan subseksi sehingga oprasional kurang berjalan dengan lancar.
- Pada minggu – minggu pertama penulis mengalami hambatan karena proses adaptasi.

3.5.2 Keberhasilan

1. Aspek organisasi

Keberhasilan yang penulis peroleh selama praktik dalam aspek organisasi yaitu penulis benar – benar mengetahui organisasi di kantor pertanahan yang sebenarnya , membentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan, proses kerja mengenai tugas dan tanggung jawab kami di kantor pertanahan, mengetahui system kerja baik dari sisi atasan maupun bawahan.

2. Aspek oprasional

Dalam aspek oprasional ini penulis dapat meningkatkan kemampuan keterampilan dalam bekerja , peningkatan pengetahuan mengenai prosedur kerja dan pengoprasian alat ukur, peningkatan percaya diri dalam mengenai konsumen dan bekerjasama baik itu dengan atasan ataupun bawahan.

3. Aspek personalia

- Tumbuhnya rasa kepercayaan diri dan peningkatan etos kerja .
- Peningkatan kemampuan keterampilan dalam bekerja
- Peningkatan wawasan dan kemampuan Peningkatan rasa tanggung jawab, disiplin, team work dalam bekerja

3.6 Pembimbingan

Pembimbingan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pembimbingan dengan pembimbing dari pihak BPN dan pembimbing dari pihak Prodi. Bimbingan dengan pembimbing dari BPN yaitu menjelaskan teknis cara pengukuran di lapangan dan cara pengolahan data, misalkan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran jarak datar dengan menggunakan pita ukur atau dengan menggunakan alat ukur theodolite, serta menerangkan cara melakukan pengolahan data hasil pengukuran di lapangan hingga menjadi peta bidang. Sedangkan bimbingan dengan pembimbing dari Prodi, yaitu bimbingan mengenai pembuatan laporan hasil dari Pendidikan Luar Akademik (PLA). Kedua bimbingan dilakukan secara rutin tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan saat menjalani PLA.